

**PENERAPAN SANKSI BAGI ORANG YANG MENDIRIKAN  
BANGUNAN HOTEL PADA ZONA GARIS SEMPADAN PANTAI DITINJAU  
DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 2 TAHUN  
2017 TENTANG SISTEM KEPARIWISATAAN DAERAH**  
**(Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**FANDOLINUS FIRMANTO  
NIM :2016110569**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS FLORES**

**ENDE**

**2022**

## LEMBARAN PENGESAHAN

PENERAPAN SANKSI TERHADAP ORANG YANG MENDIRIKAN  
BANGUNAN HOTEL PADA ZONA GARIS SEMPADAN PANTAI DI  
TINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
BARAT NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM  
KEPARIWISATAAN DAERAH  
(Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten  
Manggarai Barat)

### SKRIPSI

DISUSUN OLEH :

FANDOLINUS FIRMANTO

NIM : 2016110569

DISETUJUI

Pembimbing I

CHRISTIANA SRI MURNI, S.H., M. Hum  
NIDN : 0828066101

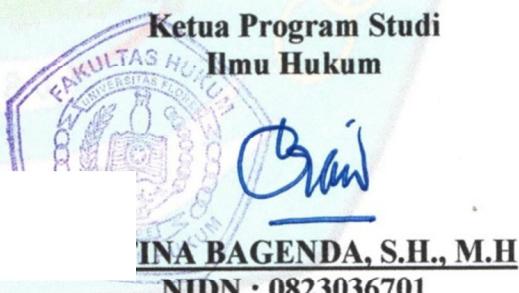
Pembimbing II

CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H  
NIDN : 0823036701

MENGETAHUI



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Flores  
PAULINUS SEDA, S.H., M.H  
NIDN : 0830067701



Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum  
INA BAGENDA, S.H., M.H  
NIDN : 0823036701

LEMBARAN PERSETUJUAN

PENERAPAN SANKSI TERHADAP ORANG YANG MENDIRIKAN  
BANGUNAN HOTEL PADA ZONA GARIS SEMPADAN PANTAI DI  
TINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
BARAT NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM  
KEPARIWISATAAN DAERAH  
(Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten  
Manggarai Barat)

S K R I P S I

Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji  
Pada Hari : Selasa

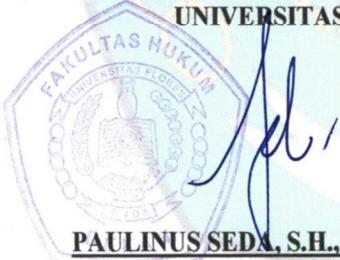
Tanggal : 25 Januari 2022

Tim Pengaji :

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Yohanes Pande, S.H., M.H          | (Ketua)      |
| 2. Sumi Rahayu Sulaiman, S.H., M.Hum | (Sekretaris) |
| 3. Kosmas Minggu, S.H., M.Hum        | (Anggota)    |
| 4. Christina Bagenda, S.H., M.H      | (Anggota)    |
| 5. Christiana Sri Murni, S.H., M.Hum | (Anggota)    |

MENGESAHKAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES



PAULINUS SEDA, S.H., M.H  
NIDN : 0830067701

KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM



CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H  
NIDN : 0823036701

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fandolinus Firmanto

Nim : 2016110569

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi	PENERAPAN SANKSI BAGI ORANG YANG MENDIRIKAN BANGUNAN HOTEL PADA ZONA GARIS SEMPADAN PANTAI DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM KEPAWISETAAN DAERAH (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat)
---------------	--

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi merupakan hasil karya sendiri dan tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ende, Januari 2022  
Penulis



Fandolinus Firmanto  
Nim : 2016110569

**MOTTO**

***SEDERHANA DALAM LANGKAH***

***BESAR DALAM UPAYA***

***(FANDOLINUS FIRMANTO)***

## **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,  
kupersembahkan karya tulisan ini untuk :

1. Yang Terhormat Kedua Orang Tua tercinta Bapak Yohanes Brechmans Bos dan Mama Emilia Felisita Do yang telah mengorbankan segala hal dalam membesarkan, mengasuh, mendidik, dan menuntunku sampai jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi.
2. Saudara-saudariku (Fridolinus Ferminio, Aristo Fabriliando Arinanto, Bertandino Syaputra, Bertolomeus Eliandro Berto Angkat, Vitus Modestus Renaldi Do, Bernardinus Defri Do, Stevania Remisel Do dan Filipe Gisela Do) yang selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
3. Keluarga Besar Antonius Angkat, Bernadus Do, Keluarga Besar Rentung-Cancar dan Keluarga Besar Kaper Labuan Bajo yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
4. Rekan-rekan seperjuangan Gerakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Ende, dan Gerakan Mahasiswa Manggarai Barat (GMMB) Kabupaten Ende yang dengan setia memberikan dorongan bagi penulis agar terus berjuang menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Universitas Flores.

## 1 ABSTRAK

**Fandolinus Firmanto, NIM : 2016110569, Fakultas Hukum, Universitas Flores, “Penerapan Sanksi Bagi Orang Yang Mendirikan Bangunan Hotel Pada Zona Garis Sempadan Pantai di Tinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Kepariwisataan Daerah Kabupaten Manggarai Barat”.**

---

Penerapan sanksi administratif pencabutan izin berdasarkan peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kepariwisataan Daerah Kabupaten Manggarai Barat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat bagi pemilik Hotel yang melanggar kawasan sempadan Pantai Pede yang merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat.

Permasalahan penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana penerapan sanksi bagi orang yang mendirikan bangunan hotel pada zona garis sempadan pantai ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Kepariwisataan Daerah Kabupaten Manggarai Barat? (2) Faktor-faktor penghambat penerapan sanksi bagi orang yang mendirikan bangunan hotel pada zona garis sempadan pantai di kawasan Pantai Pede Kabupaten Manggarai Barat?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Sanksi Bagi Orang yang Mendirikan Bangunan Hotel Pada Zona Garis Sempadan Pantai Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Kepariwisataan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, serta mengetahui Faktor-faktor penghambat Penerapan Sanksi bagi Orang yang Mendirikan Bangunan Hotel pada Zona Garis Sempadan Pantai Pede. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, artinya pendekatan dengan cara mempelajari data sekunder dalam bentuk norma yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga data primer yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Izin bagi Orang yang mendirikan bangunan Hotel Pada zona kawasan Sempadan Pantai Pede berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kepariwisataan Daerah Kabupaten Manggarai Barat belum dilaksanakan secara optimal oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat. Adapun faktor-fakor penghambat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari Faktor Internal (Tidak singkronnya antara perencanaan dan pelaksanaan, kurangnya kerja sama lintas sektor, dan lain-lain), dan Faktor Eksternal (Kurang efektifnya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang kepada Masyarakat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat serta kurangnya kesadaran atau kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tentang Pemanfaatan Ruang).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penerapan sanksi administratif pencabutan izin yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kepariwisataan daerah Kabupaten Manggarai Barat belum diterapkan karena belum adanya peraturan pelaksana yang berupa peraturan Bupati.

**2**

**3 Kata Kunci : Mendirikan Hotel, Kawasan Sempadan Pantai, Sanksi Administrasi.**

#### **4 ABSTRACT**

##### **5**

**6 Fandolinus Firmanto, NIM : 2016110569, Faculty of Law, University of Flores, "Implementation of Sanctions for People Who Build Hotel Buildings in the Coastal Border Zone in Review of Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning the Regional Tourism System of West Manggarai Regency".**

7

8 The application of administrative sanctions for revocation of permits based on Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning the Regional Tourism System of West Manggarai Regency by the Department of Public Works and Spatial Planning of West Manggarai Regency for hotel owners who violate the Pede Beach border area which is the responsibility of the Public Works and Spatial Planning Office of Manggarai Regency West.

9 The problems of this research are: (1) How is the application of sanctions for people who build hotel buildings in the coastal border zone in terms of Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning the Regional Tourism System of West Manggarai Regency? (2) The inhibiting factors for the application of sanctions for people who build hotel buildings in the coastal border zone in the Pede Beach area, West Manggarai Regency?

10 The purpose of this study was to find out how the application of sanctions for people who build hotel buildings in the coastal border zone in terms of Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning the Regional Tourism System of West Manggarai Regency, and to find out the inhibiting factors for the application of sanctions for people who build hotel buildings. in the Pede Beach Borderline Zone. The approach method used is a sociological juridical approach, meaning that it is an approach by studying secondary data in the form of norms related to the problem under study and also primary data obtained from the Department of Public Works and Spatial Planning, West Manggarai Regency.

11 The results of the study show that the application of administrative sanctions for revocation of permits for people who build hotel buildings in the Pede Beach border area based on Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning the Regional Tourism System of West Manggarai Regency has not been carried out optimally by the Public Works and Spatial Planning Office of West Manggarai Regency. The inhibiting factors of the Public Works and Spatial Planning Service consist of Internal Factors (Unsynchronized between planning and implementation, lack of cross-sectoral cooperation, etc.), and External Factors (Lack of Effective Socialization of Space Utilization to the Community by the Public Works Service). and Spatial Planning of West Manggarai Regency as well as the lack of public awareness or compliance with regulations on Spatial Utilization).

12 The conclusion of this study is that the application of administrative sanctions for revocation of permits carried out by the Public Works and Spatial Planning Office of West Manggarai Regency based on Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning the Regional Tourism System of West Manggarai Regency has not been implemented because there is no implementing regulation in the form of a Regent's regulation.

13

**14 Keywords : Establishing a Hotel, Coastal Border Area, Administrative Sanctions.**

## 15 KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan berkatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI BAGI ORANG YANG MENDIRIKAN BANGUNAN HOTEL PADA ZONA GARIS SEMPADAN PANTAI DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat)”** dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, segala hambatan yang ada dapat teratasi berkat bimbingan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Skripsi ini dapat diselesaikan walaupun terdapat kekeliruan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Simon Sira Padji, M.A selaku Rektor Universitas Flores yang telah memberikan Pengaruh besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Paulinus Seda, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah mendukung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing I Ibu Christina Sri Murni, S.H., Hum yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Dosen Pembimbing II Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam proses bimbingan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Flores yang begitu banyak memberikan ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Universitas Flores yang penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan perkuliahan di Universitas Flores.
8. Bapak Saverianus Kurniadi, ST selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat yang telah membantu peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan selama melakukan penelitian.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penulisan skripsi ini agar dapat bermanfaat kedepannya.

Ende, Januari 2022

Peneliti

**16**

17  
18  
19  
20  
21  
22

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Ruang Lingkup Masalah.....	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Lokasi Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Tentang Peraturan Daerah.....	13
2.2 Tinjauan Tentang Sanksi.....	15
2.2.1 Jenis-jenis Sanksi.....	15
2.3 Tinjauan Tentang Penegakan Hukum dan Penerapan Hukum.....	18
2.3.1 Penegakan Hukum.....	18
2.3.2 Pengertian Penerapan Sanksi .....	20
2.4 Tinjauan Tentang Izin Mendirikan Bangunan.....	21
2.5 Tinjauan Tentang Hotel dan Sempadan Pantai.....	23
2.4.1 Pengertian Hotel.....	23

2.4.2 Pengertian Sempadan Pantai.....	24
2.6 Kebijakan Penerapan Sanksi Bagi Orang Yang Mendirikan Bangunan di Kawasan Sempadan Pantai Kabupaten Manggarai Barat.....	25
2.7 Kesadaran dan Kepatuhan Hukum.....	27
2.7.1 Pengertian Kesadaran Hukum.....	27
2.7.2 Pengertian Kepatuhan Hukum.....	28
<b>BAB 111 PENERAPAN SANKSI TERHADAP ORANG YANG MENDIRIKAN BANGUNAN HOTEL PADA ZONA GARIS SEMPADAN PANTAI.....</b>	<b>29</b>
3.1.Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat.....	29
3.1.1 Tugas dan Fungsi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat.....	30
3.1.2 StrukturDinasPekerjaanUmumdanPenataanRuangKabupatenM anggarai Barat.....	31
3.1.3 Tugas dan Fungsi Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Bara .....	32
1.2.3.1 Seksi Perencanaan Tata Ruang .....	33
1.2.3.2 Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.....	34
3.2.Gambaran Umum Pantai Pede Gorontalo... .....	34
3.3.Penerapan Sanksi Bagi Orang yang Mendirikan Bangunan Hotel Pada Zona Garis Sempadan Pantai di Kawasan Pantai Pede Gorontalo di Tinjau dari Peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Kepariwisataan Daerah.....	36
3.3.1 Penerapan Sanksi Administratif..... .....	41
<b>BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENERAPAN SANKSI BAGI ORANG YANG MENDIRIKAN BANGUNAN HOTEL PADA ZONA GARIS SEMPADAN PANTAI DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT.....</b>	<b>50</b>
4.1 Faktor Internal.....	51
4.2 Faktor Eksternal.....	54

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**